

Peran Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Keuangan Di Indonesia

Nanang Sobarna¹⁾, Alya Salsabila²⁾, Sholihatunnisa³⁾, Syahrul Khairul Anwar Al Husein⁴⁾, Muhamad Rijal Pirdaus⁵⁾, Siti Maisaroh Annawawiyah⁶⁾, Jeni Nurjaman⁷⁾, Nabila Syalsabilah⁸⁾

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia

Email: nanangsobarna85@gmail.com¹⁾, Alyasabilya11@gmail.com²⁾, sholihatunnisamaida18@gmail.com³⁾, syahrulhairulanwar@gmail.com⁴⁾, muhamadrijalpirdaus43@gmail.com⁵⁾, maisaroh7562@gmail.com⁶⁾, azzen197@gmail.com⁷⁾, nabilasyalsabilah@gmail.com⁸⁾

ABSTRAK

Sistem keuangan syariah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Melalui fungsinya sebagai intermediasi dana, penyediaan likuiditas, pembiayaan investasi, dan pengelolaan risiko, sistem keuangan memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan larangan riba, memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peran sistem keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penggunaan teknik deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional yang terindeks, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset keuangan syariah di Indonesia akan meningkat sebesar 12,48% setiap tahun hingga Rp2.756,45 triliun pada Juni 2024. Market share keuangan syariah saat ini mencapai 11,41%. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Selain itu, hingga Juni 2024, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya mencapai 26,1 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dana sosial syariah. Untuk memaksimalkan peran keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperkuat regulasi, agar tujuan membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat dicapai dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan

ABSTRACT

The Islamic financial system is crucial for driving economic growth in developing countries like Indonesia. Through its functions as a fund intermediary, liquidity provider, investment financing, and risk management, the financial system plays a strategic role in driving a country's economic growth. Based on the principles of justice and the prohibition of usury, the Islamic financial system has the potential to drive economic growth and financial inclusion in Indonesia. The purpose of this study is to uncover the role of the Islamic financial system in promoting inclusive economic development in Indonesia. This study employed a qualitative methodology involving the use of descriptive analytical techniques. Data were collected through literature research from accredited national journals, indexed international journals, and other relevant sources. Research

shows that Islamic financial assets in Indonesia will increase by 12.48% annually, reaching IDR 2,756.45 trillion by June 2024. The current market share of Islamic finance is 11.41%. This demonstrates public interest in Islamic financial products. Furthermore, as of June 2024, the collection of zakat, infaq, sadaqah, and other social funds reached IDR 26.1 trillion, indicating significant growth in Islamic social funds. To maximize the role of Islamic finance in driving Indonesia's economic growth, all stakeholders must work together to improve financial literacy and inclusion, and strengthen regulations, so that the goal of building an inclusive and equitable economy can be achieved.

Keywords: *Islamic Financial System, Economic Growth, Financial Inclusion*

PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sistem keuangan memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsinya sebagai intermediasi dana, penyediaan likuiditas, pembiayaan/ investasi dan pengelolaan risiko. Fungsi-fungsi ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pasar yang lebih efisien, meningkatkan akses kredit, dan mendukung keberlanjutan bisnis di berbagai bidang ekonomi (Levine, 2005). Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, inklusi keuangan menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Karena inklusi keuangan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan formal (Dienillah & Anggraeni, 2016).

Sistem keuangan negara berkembang sering menghadapi masalah regulasi yang lemah dan akses yang terbatas. Ketidakpastian di pasar keuangan dan peningkatan risiko terhadap kestabilan ekonomi seringkali disebabkan oleh kurangnya regulasi. Karena risiko yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi, bank dan lembaga keuangan kadang-kadang tidak memiliki insentif yang memadai untuk beroperasi di wilayah yang kurang berkembang. Sebaliknya, sistem keuangan yang tidak stabil lebih rentan terhadap krisis ekonomi global, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam ekonomi makro dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Beck et al., 2010).

Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada sejauh mana sistem keuangan yang mampu memberikan kemudahan akses modal secara adil kepada individu maupun sektor usaha. Ini menjadi semakin penting di tengah tantangan global seperti peningkatan ketimpangan ekonomi, kurangnya akses masyarakat miskin ke layanan keuangan formal, dan kebutuhan mendesak akan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan sosial dan lingkungan (Todaro & Smith, 2020).

Salah satu sistem keuangan yang dianggap mampu mendukung pembangunan ekonomi inklusif adalah keuangan syariah. Keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan larangan riba, berpotensi menjadi katalisator bagi terciptanya akses keuangan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sektor keuangan Islam telah muncul dan berkembang di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat untuk solusi keuangan yang etis dan pengaruh prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada akad-akad atau kontrak yang melibatkan konsep bagi hasil, transaksi jual beli, dan penyediaan jasa. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum Islam yang mementingkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini

didasarkan pada akad-akad atau kontrak yang melibatkan gagasan tentang hasil, jual beli, dan penyediaan jasa. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam yang mementingkan keadilan (Alaoui & El Marzouki, 2022).

Sistem keuangan syariah hadir dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial, yang dikuatkan dengan prinsip larangan riba, bagi hasil, dan pengelolaan instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah memberikan landasan moral dan operasional yang unik. Sistem ini tidak hanya menawarkan alternatif yang inklusif tetapi juga dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, keuangan syariah telah berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan. Dengan memanfaatkan instrumen seperti pembiayaan mikro syariah, sistem ini berpotensi meningkatkan akses modal bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian negara (Umida et al., 2024).

Namun, peran sistem keuangan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang masih menjadi area penelitian yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Kajian empiris yang mendalam diperlukan untuk mengukur sejauh mana sistem ini mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendukung stabilitas sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif di negara-negara berkembang. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber terkait, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana keuangan syariah mampu berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengoptimalkan potensi keuangan syariah sebagai solusi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan berfokus pada teori ekonomi pembangunan dan bukti empiris yang ditemukan dalam literatur nasional dan internasional. Penelitian ini menganalisis peran sistem keuangan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, dimana studi literatur digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder yang relevan (Lexy J. Moleong, 2017). Desain ini dipilih karena memungkinkan pengkajian mendalam terhadap peran sistem keuangan dalam konteks pembangunan ekonomi, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mengembangkan sektor keuangannya.

Sumber Data pada penelitian ini bersumber dari Jurnal nasional, jurnal internasional dan database lainnya adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Buku referensi penting, seperti *Economic Development* karya Todaro dan Smith, artikel dari jurnal ekonomi internasional, dan laporan yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, termasuk dalam literatur yang dipilih.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis konten. Metode ini meliputi artikel atau sumber yang relevan untuk menemukan tema utama dan pola yang

berulang. Dengan menggunakan metode ini, para peneliti dapat membuat kategori konseptual yang mencakup peran penting sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Sistem keuangan ini mencakup tidak hanya sektor perbankan syariah, tetapi juga pasar modal syariah, asuransi syariah, dan berbagai sektor keuangan lainnya. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, keuangan syariah melarang praktik riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), serta mendorong pembagian risiko melalui mekanisme bagi hasil. Instrumen-instrumen seperti *murabahah*, *musharakah*, dan *ijarah* dirancang untuk menciptakan hubungan keuangan yang saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, fungsi sosial keuangan syariah diwujudkan melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berperan penting dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu dan mendukung inklusi keuangan (Rahmat, 2022).

Sistem keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di negara-negara berkembang. Prinsip dasar keadilan, berbagi risiko, dan orientasi sosial menjadikan keuangan syariah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kurang mampu dan kelompok marginal. Melalui produk-produk seperti pembiayaan mikro, modal ventura, dan instrumen keuangan sosial (zakat, wakaf, sedekah), keuangan syariah dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput (Satriak Guntoro & Ahmad, 2022).

Keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Ilmiah et al., 2024). Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan berkontribusi pada keberhasilan keuangan syariah karena mereka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal (Shafira & Sisdiyanto, 2024).

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi inklusif di negara-negara berkembang di antaranya adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih terbatasnya infrastruktur dan dukungan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan industri keuangan syariah.

Inklusi Keuangan

Konsep inklusi keuangan menekankan betapa pentingnya memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, memiliki akses ke layanan keuangan formal yang sesuai kebutuhan, aman, dan terjangkau. Menurut Klapper, inklusi keuangan berdampak besar pada pemberdayaan ekonomi rumah tangga, terutama melalui penggunaan layanan seperti rekening tabungan dan kredit mikro, yang memberi banyak kesempatan untuk merencanakan keuangan dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap risiko (Demirguc-Kunt et al., 2018).

Akses kredit di wilayah pedesaan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global (Burgess & Pande, 2005). Namun, sejumlah tantangan struktural dan sosial terus muncul dalam proses menerapkan inklusi keuangan di negara berkembang. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pengetahuan keuangan, yang menyebabkan banyak orang tidak tahu pentingnya atau cara menggunakan layanan keuangan formal.¹ Selain itu, daerah terpencil tidak dapat mengakses layanan keuangan digital karena keterbatasan infrastruktur teknologi seperti perangkat mobile dan jaringan internet. Salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau adalah pengembangan teknologi finansial atau fintech (Ayyagari et al., 2007).

Selain itu, untuk meningkatkan efek positif inklusi keuangan, program pemerintah yang mendorong literasi keuangan dan subsidi untuk akses internet di wilayah terpencil juga diperlukan. Pendekatan holistik ini melibatkan penguatan regulasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan literasi keuangan untuk mengatasi hambatan yang ada dan memaksimalkan potensinya untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Peran Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif dalam berbagai sektor keuangan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah dapat menjadi arus baru ekonomi yang mampu berjalan secara beriringan dengan ekonomi konvensional dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional, hal ini menjadi bukti peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Market share keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) saat ini mencapai 11,41%. Meskipun angka ini masih kecil dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional, peningkatan ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi lebih kompetitif dan menarik perhatian Masyarakat (Putra, 2024).

Jumlah aset keuangan syariah di Indonesia meningkat pesat, mencapai Rp 2.756,45 triliun pada Juni 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 12,48% dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2.582 triliun. Kinerja positif industri keuangan syariah yang semakin kuat dan berkontribusi pada perekonomian negara tercermin dari total penyaluran pembiayaan syariah Rp 14.682 triliun dengan pangsa pembiayaan syariah mencapai angka 47,31%. Kontribusi keuangan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional hingga Juni 2024 tercatat sebesar 45,66%. Ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya menawarkan pembiayaan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Saputra, 2024).

Sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah sampai Juni 2024 menyumbang sebagian besar dari total aset keuangan syariah. Sektor perbankan syariah tercatat memiliki total aset sebesar Rp 897 triliun, sementara pasar modal syariah berkontribusi sebesar Rp1.689 triliun. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh industri keuangan syariah di Indonesia (Saputra, 2024).

Hingga September 2024, sukuk negara secara akumulatif memberikan kontribusi sebesar Rp 2.808,66 triliun untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara),

¹ Todaro, M. P. & Smith, S. C. 2011. *Economic Development*. United Kingdom: Pearson Education Limited.

dengan sisa sukuk sebesar Rp 1.565,72 triliun. Ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap penggunaan instrumen keuangan syariah untuk membiayai proyek pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah aset dan bagian pasar keuangan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar industri ini dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Sistem keuangan syariah melalui Lembaga keuangan syariah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah yang mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial dengan mengoptimalkan dana sosial syariah. Dalam lima tahun terakhir, dana sosial syariah pula di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai Juni 2024, BAZNAS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) telah mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) senilai Rp 26,1 triliun. Pertumbuhan ini, yang mencapai 68,3% tahun ke tahun, dengan penerima manfaat sejumlah 75 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya donasi dan sumbangan keagamaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Selain itu, program wakaf telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Sejak Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan pada Januari 2021, jumlah uang yang diwakafkan mencapai Rp 2,56 triliun. Jumlah ini meningkat 212% dalam kurun waktu lima tahun, menunjukkan betapa efektifnya gerakan wakaf dalam mengumpulkan uang untuk kegiatan sosial. Gerakan wakaf uang temporer yang berbasis pengelolaan pada sukuk negara (juga dikenal sebagai sukuk wakaf terkait uang) juga telah mencapai Rp1 triliun. Kontribusi ini merupakan 39% dari capaian akumulasi wakaf uang dan telah mendukung berbagai program sosial yang bernazhir, seperti operasi katarak gratis dan pemberdayaan peternak (Putra, 2024). Proyek-proyek ini menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. Penyebaran wakaf uang berbasis sukuk negara menunjukkan kemajuan dalam manajemen dana sosial syariah. Para donor dapat langsung mendukung inisiatif sosial melalui sistem ini tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Ini meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan dana.

BAZNAS dan BWI bekerja sama untuk mengatur dan meningkatkan kampanye wakaf. Mereka juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam program wakaf. Oleh karena itu, diharapkan bahwa dana sosial syariah akan terus berkembang dan terus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berbagai jenis donasi dan sumbangan keagamaan adalah bagian dari ekonomi syariah Indonesia, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan konvensional. Sistem ekonomi syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, terdiri dari wakaf, infak, sedekah, dan zakat. Selain itu, ada potensi besar untuk meningkatkan kapital sosial masyarakat melalui program wakaf uang temporer yang berbasis sukuk negara. Sistem ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berdonasi dan berpartisipasi dalam penggalangan dana dengan memungkinkan dana ditransfer langsung ke inisiatif sosial.

Meningkatnya partisipasi publik juga dipengaruhi oleh peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dana sosial syariah. Jumlah dana yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dapat meningkat seiring dengan jumlah orang yang mengetahui manfaat dan cara berdonasi. Untuk mendukung pengembangan dana sosial syariah, pemerintah Indonesia juga telah mengambil tindakan strategis. Salah satunya adalah undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan sebagian

keuntungan mereka sebagai zakat. Diharapkan langkah ini akan meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk kegiatan sosial. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana sosial syariah. BAZNAS dan BWI sering mengeluarkan laporan yang menunjukkan bagaimana dana digunakan dan apa yang dicapai.

Sektor keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif, akan tetapi literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah masih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian nasional. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK dan BPS, indeks literasi keuangan syariah masih berada pada level 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Angka ini masih jauh, jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 65,43% dan inklusi keuangan nasional yang sudah mencapai angka 75,02%. Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan produk dan manfaat keuangan syariah secara optimal, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah, disamping memperkuat regulasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa produk keuangan syariah harus lebih mudah diakses. Lembaga keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak orang dengan memperluas jaringan distribusi dan menyediakan produk yang lebih beragam. Hal ini akan meningkatkan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional dan pangsa pasarnya. Untuk menyediakan produk keuangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, lembaga keuangan syariah harus terus mengikuti trend pasar dan kemajuan teknologi. Misalnya, pengembangan fintech berbasis syariah dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan keuangan.

Untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, OJK telah mengambil langkah-langkah strategis dari sisi regulasi. OJK berusaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan produk keuangan syariah.

Secara keseluruhan, keuangan syariah di Indonesia telah banyak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki peran besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan keuangan inklusif di Indonesia. Ke depan, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha kemajuan keuangan syariah perlu untuk bekerja sama guna membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan cara ini, tujuan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Sistem keuangan syariah berperan secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Keuangan syariah semakin menunjukkan kekuatan dan daya saingnya di tengah tantangan global, dengan total aset mencapai Rp 2.756,45 triliun pada Juni 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 12,48%. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah ditunjukkan oleh bagian pasar keuangan syariah yang mencapai 11,41%. Keberhasilan ini tidak terlepas kontribusi sektor keuangan syariah, seperti sektor perbankan syariah yang memiliki total aset sebesar Rp 87 triliun dan pasar modal syariah sebesar Rp 1.68 triliun serta dari dukungan pemerintah melalui instrumen keuangan syariah, seperti Sukuk Negara, yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai Rp 2.808,66 triliun, dengan outstanding sebesar Rp1.565,72 triliun, menunjukkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam menggunakan instrumen keuangan syariah untuk membiayai proyek pembangunan. Sementara itu, sektor perbankan syariah

Selain itu, dana sosial syariah juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada Juni 2024, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya mencapai 26,1 triliun rupiah. Pertumbuhan sebesar 68,3% ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sosial untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, program wakaf telah mengalami kemajuan besar. Sejak Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan pada Januari 2021, jumlah uang yang diwakafkan mencapai Rp 2,56 triliun.

Namun, dalam rangka untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia, perlu kiranya kerjasama antara sektor keuangan syariah, masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperkuat regulasi, dan mendorong kerja sama antar pemangku kepentingan, sehingga tujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat tercapai dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaoui, S. B., & El Marzouki, A. (2022). The Expansion of Islamic Finance in the World: Review on International Organizations. *Recherches et Applications En Finance Islamique*.
- Ayyagari, M., Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2007). Small and medium enterprises across the globe. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-006-9002-5>
- Beck, T., Demirgü-Kunt, A., & Levine, R. (2010). Financial institutions and markets across countries and over time: The updated financial development and structure database. *World Bank Economic Review*. <https://doi.org/10.1093/wber/lhp016>
- Burgess, R., & Pande, R. (2005). Do rural banks matter? Evidence from the Indian social banking experiment. In *American Economic Review*. <https://doi.org/10.1257/0002828054201242>
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. In *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). DAMPAK INKLUSI KEUANGAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ASIA. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574>
- Ilmiah, J., Terpadu, M., Selasi, D., Islam, U., Bangsa, B., & Syariah, E. (2024). Pengaruh investasi reksadana syariah terhadap perkembangan ekonomi syariah indonesia tahun 2013-2023. 8(11), 135–142.
- Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence (Handbook Chapter 12). *Handbook of Economic Growth*.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Qualitative Research Methodology*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, I. (2024). Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045. *KNEKS*. <https://www.kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045?category=3>.
- Rahmat, F. (2022). PERANAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DALAM

- PENGEMBANGAN USAHA KECIL PADA OPERASIONAL BAITUL MAAL WAT TAMWIL. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i2.921>
- Saputra, B. (2024). OJK catat total aset industri keuangan syariah capai Rp2.756 triliun. *ANTARA*. https://www.antaranews.com/berita/4286771/ojk-catat-total-aset-industri-keuangan-syariah-capai-rp2756-triliun#google_vignette.
- Satriak Guntoro, & Ahmad. (2022). Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10044](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10044)
- Shafira, H., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan. *Jurnal Anggaran*, 2(2).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *ECONOMIC DEVELOPMENT* (13th ed.). Pearson Education Limited.
- Umida, N., Anggriani, R. A., Studi, P., Keuangan, M., Syariah, J., Ekonomi, D., Tinggi, S., Islam, A., & Bengkalis, N. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(7), 181–194.